

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat institusionalisasi (pelembagaan) merupakan dimensi penting untuk memahami sistem partai. Sistem partai adalah himpunan partai-partai yang berinteraksi dengan cara-cara yang terpola (Richard Katz & William Crotty, 2014, pp. 336-338). Salah satu usaha paling awal untuk meneliti internal partai dilakukan oleh Mosei Ostrogorski dalam karyanya *Democracy and the Organization of Political Parties* di tahun 1902, yang berargumen bahwa keterwakilan kepentingan-kepentingan individu telah hilang oleh semakin meningkatnya pengaruh dari mesin partai dan kontrol yang diberikan oleh sebuah kaukus dari tokoh-tokoh senior partai. Pandangan ini sangat terkenal diekspresikan oleh Robert Michels dalam karyanya *Political Parties* di tahun 1962, dalam bentuk hukum besi oligarki, atau sebagaimana yang dinyatakan oleh Robert Michels, siapa yang berbicara tentang organisasi berarti berbicara tentang oligarki. Robert Michels Michels, seorang teoretikus elit terkemuka, hendak menganalisis struktur kekuasaan dari partai SPD Jerman, di mengatakan bahwa, meskipun partai tersebut secara formal merupakan organisasi demokratis, kekuasaan tetap terpusat pada tangan-tangan pimpinan partai (Andrew Heywood, 2014, p. 426)

Perspektif keorganisasian dalam pelembagaan partai dapat dilacak dari Maurice Duverger yang mentikberatkan pada aspek-aspek yang lebih formal mengenai partai politik. Substansi gagasan Maurice Duverger menjustifikasi bahwa

kekuatan organisasi partai merupakan keniscayaan untuk menghasilkan partai-partai yang kokoh secara elektoral melalui ekspansi elemen-elemen dasar partai (*basic elements*) seperti *caucus*, *branch*, *cell* dan *militia*. Konsep basic elements memberi pemahaman bahwa pelembagaan partai dihasilkan ketika partai mencapai perkembangan kelembagaannya secara formal (Nugroho, 2021, p. 23).

Gagasan Maurice Duverger mengenai kekuatan keorganisasian partai di atas mengerucut pada pemaknaan pelembagaan partai secara formal. Pelembagaan partai ini hadir karena ditopang oleh dua aspek. *Pertama*, kekuatan organisasi partai dalam mengontrol elemen-elemen dasar partai (*caucus*, *branch* dan *militia*) sebagai mesin elektoral. *Kedua*, kemampuan mesin elektoral partai dalam menghasilkan keanggotaan, pemilih dan perolehan kursi dalam parlemen. Pelembagaan partai secara formal ini mengandaikan terpenuhinya dua syarat yakni partai politik mampu mengoperasionalkan elemen-elemen dasarnya sebagai mesin ekspansi territorial dan elektoral serta adanya dukungan elite atau aktor dari tingkat pusat partai hingga terbawah terhadap otoritas partai sebagai institusi tunggal untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Terpenuhinya dua syarat di atas akan memungkinkan partai berkembang menjadi kekuatan yang memiliki keunggulan-keunggulan elektoral seperti keanggotaan, pemilih dan kursi parlemen (Nugroho, 2021).

UUD NKRI Tahun 1945 memberikan jaminan pelembagaan demokrasi sebagai bagian dari hak sipil dan politik yang secara eksplisit tertuang pada Pasal 28 yang menegaskan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Dalam rangka pelaksanaan demokrasi, hak untuk berserikat dan

berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia dan sebagai konsekuensi partai politik sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi (Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, 2023, p. 144).

Eksistensi partai politik di Indonesia dapat merujuk pada penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menuliskan bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, definisi partai politik adalah “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, 2023).

Fungsi utama dan pertama partai politik menurut Surbakti (2007, pp. 116–121) adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Adapun cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi dalam rangka mendapatkan

dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi yang penting dari partai politik. Sebagaimana disebutkan oleh Dalton dan Martin P. Wattenberg, bahwa salah satu fungsi partai politik antara lain adalah sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari jabatan publik (Windharti et al., 2021, p. 739).

Miriam Budiarjo menyebutkan bahwa rekrutmen politik berfungsi untuk mencari anggota baru dan mengajak individu yang (dinilai) memiliki bakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam pengertian umum Reuven Y. Hazan, menjelaskan rekrutmen politik sebagai seleksi kandidat (kandidasi) rekrutmen legislatif dan eksekutif. karena proses kandidasi merupakan salah satu penentu dari kualitas hasil pemilu (Windharti et al., 2021).

Tahap Kandidasi menjadi tonggak awal yang penting bagi setiap parpol. Dalam hal kandidasi di sebuah partai politik terdapat satu konsep yang telah menjadi konsep dasar dari model kandidasi yang demokratis, yang disebut konsep demokrasi intra partai. Praktik yang ideal adalah partai politik dapat mengimplementasikan demokrasi di internalnya sendiri. Demokrasi intra partai menggambarkan pola relasi kuasa yang setara diantara yang ada dalam suatu partai politik. Demokrasi intra partai menurut Croissant dan Chambers dapat dikatakan sebagai sebuah karakter distribusi atas kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan antara anggota dan pemimpin di dalam sebuah politik yang didasarkan pada prinsip inklusivitas dan desentralisasi (Allahi & Rahman, 2020, p. 48).

Kandidasi adalah komponen sentral dari proses politik. Pengorganisasian partai politik bermuara pada lahirnya para kandidat yang akan mengikuti pemilihan

umum. Dengan demikian, para kandidat adalah garda terdepan bagi parpol dalam rangka implementasi atas ideologi dan platform. Dalam konteks pemilu, kandidasi adalah input dari proses pemilu yang panjang. Proses pemilu yang demokratis dan berintegritas tidak akan mampu melahirkan representasi politik yang sesuai dengan kehendak rakyat jika bahan mentah dari pemilu itu sendiri sudah jelek (Tampinongkol et al., 2019, p. 3).

Membahas kandidasi (penetapan kandidat) akan mengurai banyak hal tentang partai politik, diantaranya kandidasi menunjukkan dimana lokus kekuasaan di partai politik itu berada sesungguhnya, kandidasi menggambarkan bagaimana sirkulasi elit terjadi, kandidasi akan menunjukan politik representasi yang dihadirkan partai politik, kandidasi memperlihatkan perjuangan kekuasaan di internal partai, kandidasi menjadi penentu bagaimana wajah partai di ruang publik dan kandidasi memperlihatkan tipe kepartaian

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai yang lahir di era Reformasi. Sejarah PDIP dapat dirunut mulai dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927. PNI bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Partai gabungan tersebut kemudian dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973. Karena pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998, PDI di bawah pimpinan Megawati Sukarnoputri semakin kuat, dan ditetapkan sebagai ketua DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali. Megawati Sukarnoputri kemudian mengubah

nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu. Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. PDI Perjuangan (PDIP) melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP periode 2000-2005. Pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Sukarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIP periode 2015-2020 (Rachmayani & Warganegara, 2023, p. 395)

PDI-P memahami partai sebagai alat perjuangan untuk membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Partai juga sebagai alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berKetuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi (TRI SILVA), serta alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (EKA SILVA). Selain itu PDI-P merupakan wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warganegara dengan cara membumikan ajaran-ajaran Sukarno sebagai teori perjuangan sekaligus tujuan perjuangan politik. Asas partai PDI-P itu sendiri adalah Pancasila sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya 1 Juni 1945. Jati diri partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan sosial serta watak partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner. PDI-P masih memakai ajaran Sukarno tentang marhaenisme sebagai dasar dari semangat

perjuangannya yang tertuang dalam asas, jatidiri serta watak partai (Wiwin Kurniasih, 2018, pp. 8–9)

Keyakinan dan identitas tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam dokumen resmi sikap dan kebijakan partai yang menyatakan bahwa PDI-P menyakini bahwa Nasionalisme PDI-P adalah nasionalisme berwatak kerakyatan dan kemanusiaan. Nasionalisme kerakyatan yang digunakan PDI-P adalah nasionalisme Sukarno atau Marhaenisme seperti yang terdapat didalam sikap dan kebijakan PDI-P yang mengatakan bahwa PDI-P memiliki kewajiban sejarah, ideologis dan politis untuk memulihkan nasionalisme kerakyatan (sosio nasionalisme) sebagaimana yang digagas oleh Sukarno agar bisa hidup kembali sebagai bagian utuh dari seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Ajaran Sukarno tentang marhaenisme memiliki posisi yang mendasar sebagai dasar perjuangan PDI-P. Inti marhaenisme mengalir dalam nafas gerak PDI-P untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang dikenal dengan Trisakti Bung Karno. Asas partai yang digunakan yakni Pancasila 1 Juni 1945 yang bercirikan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial (sosio nasionalisme– sosio demokrasi : Marhaenisme) serta berpegang teguh pada prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari bidang ekonomi dan berkepribadian di dalam kebudayaan (Trisakti) (Wiwin Kurniasih, 2018).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membangun struktur organisasi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Manggarai Timur, dengan pembentukan cabangnya pada tahun 2008. Kabupaten Manggarai Timur menjadi daerah otonom baru setelah dipisahkan dari Kabupaten Manggarai pada tahun 2007.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) langsung berpartisipasi dalam pemilu 2009 setelah pembentukannya, berhasil meraih 2 kursi di DPRD Kabupaten Manggarai Timur. Pada pemilu 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengalami peningkatan jumlah kursi menjadi 3, dan pada pemilu 2019, partai ini turun menjadi 2 kursi di DPRD Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 1.1
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di Kabupaten Manggarai
Pemilu 2009-2019

Pemilu 2009			
No	Partai Politik	Perolehan Suara Peserta Pemilu	Jumlah Kursi
1	Golkar	9.066	4
2	Demokrat	4.980	3
3	PDIP	5.504	3
4	Hanura	3.152	2
5	PKPI	3.341	2
6	PMB	3.120	2
7	PKPB	3.784	2
8	PDS	3.926	2
9	PPPI	1.351	1
10	PRN	1.287	1
11	PPI	1.012	1
12	PKB	1.836	1
13	PDP	1.366	1
14	PPRN	1.233	1
15	PKS	2.397	1
16	PAN	1.834	1
17	PPDI	2.201	1
18	PDK	1.754	1
Pemilu 2014			
1	Demokrat	13.079	4
2	Gerindra	11.312	4
3	PDIP	14.566	3
4	Golkar	13.786	3
5	PAN	12.470	3
6	Nasdem	11.648	3
7	PKPI	10.982	3
8	PKB	12.455	2
9	PBB	8.931	2
10	PKS	7.109	2

11	Hanura	9.459	1
Pemilu 2019			
1	PAN	17.687	5
2	Hanura	14.297	4
3	Perindo	13.719	4
4	PKB	12.767	4
5	Nasdem	11.440	2
6	PDIP	11.294	2
7	Golkar	10.572	2
8	Demokrat	9.749	2
9	PKS	10.011	2
10	PSI	6.588	1
11	PBB	5.239	1

Sumber data diolah dari KPU Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024

Pada pemilu 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mencatat pencapaian signifikan dengan meraih 5 kursi, menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sejak keikutsertaannya pada tahun 2009. Kemenangan ini merupakan yang pertama kalinya bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak terlibat dalam proses pemilu di Kabupaten Manggarai Timur. Peningkatan jumlah kursi ini mencerminkan dukungan masyarakat terhadap visi program, faktor figur dan strategi pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam konteks pembangunan dan kebijakan di tingkat daerah.

Keberhasilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam meraih 5 kursi di DPRD Kabupaten Manggarai Timur pada pemilu 2024 menunjukkan bahwa partai ini mampu mengkonsolidasikan kekuatannya dan menarik dukungan yang signifikan dari pemilih, dimana pada pemilu 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh 11.294 suara (2 kursi), sedangkan PAN keluar sebagai pemenang dengan perolehan 17.687 suara (5 kursi). Hal menggambarkan komitmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam memperluas jaringan dan memperkuat basis organisasi di tingkat lokal,

sehingga dapat berperan aktif dalam pembentukan kebijakan serta representasi masyarakat Kabupaten Manggarai Timur secara lebih efektif di tingkat legislatif.

Tabel 1.2
Jumlah Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu di Kabupaten Manggarai Timur (Pemilihan DPRD) Tahun 2024

No	Partai Politik	Daerah Pemilihan Legislatif Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024					Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	Jumlah Kursi
		I	II	III	IV	V		
1	PKB	3.491	4.873	1.773	3.943	1.406	15.486	3
2	Gerindra	2.725	2.536	1.046	1.365	2.486	9.158	2
3	PDIP	7.371	3.296	987	5.293	4.620	21.567	5
4	Golkar	2.018	1.771	2.164	3.356	1.592	10.901	2
5	Nasdem	2.135	2.706	1.973	2.741	2.948	12.503	3
6	Buruh	830	128	1.246	176	985	3.365	0
7	Gelora	75	133	32	320	44	604	0
8	PKS	2.307	12	1.740	2.645	18	6.722	0
9	PKN	403	757	308	34	7	1.509	0
10	Hanura	3.336	3.551	1.155	5.856	3.508	17.406	4
11	Garuda	0	0	0	0	0	0	0
12	PAN	3.795	6.295	2.248	4.277	1.372	17.987	4
13	PBB	8	1.443	6	5	4	1.466	0
14	Demokrat	4.183	2.812	2.589	4.931	3.401	17.916	5
15	PSI	1.100	1.465	203	745	1.454	4.967	0
16	Perindo	2.411	1.572	976	341	2.954	8.254	2
17	PPP	0	0	0	0	0	0	0
18	Ummat	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		36.188	33.35	18.44	36.02	26.79	149.81	30
		8	0	6	8	9	1	

Sumber data diolah dari KPU Manggarai Timur Tahun 2024

Hasil pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Manggarai Timur menempatkan PDIP keluar sebagai pemenang dengan perolehan 21.567 suara dan meraih 5 Kursi. Sama seperti PDIP, Demokrat juga meloloskan lima wakilnya ke DPRD Manggarai Timur. Jumlah kursinya bertambah banyak dari periode

sebelumnya yang hanya dua kursi. Demokrat gagal merebut kursi Ketua DPRD Manggarai Timur karena kalah jumlah suara dari PDIP. Demokrat hanya memperoleh suara sebanyak 17.916 suara, diikuti oleh Partai Hanura dan PAN dengan 4 Kursi, PKB dan Nasdem dengan 3 Kursi serta Gerindra, Golkar dan Perindro dengan 2 kursi.

Tabel 1.3
Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur yang Terpilih Periode 2009-2024 dari Partai PDIP

Anggota DPRD PDIP Periode 2009-2014		
Nama	Dapil	Kecamatan
Vinsensius Aliman	III	Borong
Wilbrodus Nurdin	I	Poco Ranaka
Anggota DPRD PDIP Periode 2014-2019		
Gorgonius Bajang	I	Elar, Elar Selatan, Lambaleda dan Sambi Rampas
Epifanus Mangu	III	Borong dan Ranamese
Hironimus Agas Ridianto	IV	Kota Komba
Anggota DPRD PDIP Periode 2019-2024		
Salesius Medi	I	Borong dan Ranamese
Gorgonius Bajang	IV	Elar, Elar Selatan, Lambaleda dan Sambi Rampas
Anggota DPRD PDIP Periode 2024-2029		
Salestinus Medi	I	Borong dan Ranamese
Tarsisius Jangkur		
Antonius Dehot	II	Lamba Leda Selatan dan Lamba Leda Timur
Paulus Yorit Poni	IV	Elar, Elar Selatan dan Congkar
Gensius Jerabu	V	Kota Komba dan Kota Komba Utara

Sumber data diolah dari KPU Manggarai Timur 2024

Berdasarkan tabel 1.3 di atas tentang anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur yang Terpilih Periode 2009-2024 dari Partai PDIP, dapat di lihat bahwa dinamika signifikan dari periode ke periode. Pada 2009-2014, PDIP memperoleh 2 kursi melalui Wilbrodus Nurdin (Dapil I) dan Vinsensius Aliman (Dapil III). Periode 2014-2019, terjadi peningkatan menjadi 3 kursi dengan keterpilihan

Gorgonius Bajang (Dapil I), Epifanus Mangu (Dapil II), dan Hironimus Agas Ridianto (Dapil IV). Namun, periode 2019-2024, perolehan kursi PDIP menurun kembali menjadi 2 kursi, yang diraih oleh Salesius Medi (Dapil I) dan Gorgonius Bajang (Dapil IV). Puncaknya, pada periode 2024-2029, PDIP meraih kemenangan besar dengan peningkatan signifikan menjadi 5 kursi melalui Salestinus Medi dan Tarsius Jangkur (Dapil I), Antonius Dehot (Dapil II), Paulus Yorit Poni (Dapil IV), serta Gensius Jerabu (Dapil V), mencerminkan strategi politik dan penguatan basis yang efektif.

Mengkaji kemenangan PDIP dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Manggarai Timur dari perspektif strategi politik menjadi sangat menarik, terutama mengingat sejarah kekalahan PDIP sejak Pemilu 2009 pasca pemekaran Manggarai Timur dari Kabupaten induk Manggarai tahun 2007. PDIP baru berhasil meraih kemenangan pada Pemilu 2024, sementara pada Pemilu 2009 Partai Golkar menjadi pemenang, disusul oleh Partai Demokrat pada 2014, dan PAN pada 2019.

Kemenangan PDIP dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Manggarai Timur menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti, terutama dengan mempertimbangkan kekalahan partai ini dalam pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019. Kekalahan tersebut memberikan pelajaran berharga bagi PDIP dalam merumuskan strategi politik yang lebih efektif untuk memenangkan Pemilu 2024.

Dengan melihat latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Politik DPC PDIP Manggarai Timur Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2024 Di Kabupaten Manggarai Timur “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Strategi Politik DPC PDIP Manggarai Timur Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2024 Di Kabupaten Manggarai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mendeskripsikan Strategi Politik DPC PDIP Manggarai Timur Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2024 Di Kabupaten Manggarai Timur
- b) Untuk menganalisis Strategi Politik DPC PDIP Manggarai Timur Dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2024 Di Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Strategi Partai Politik Dalam Pemilihan Legislatif bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

- b) Agar dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan strategi politik oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2029 Di Kabupaten Manggarai Timur.